




INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN
RENJA
— — — — —
2025

 Jl. Untung Suropati Nomor 10

 @inspektoratsidoarjo

 (031) 8948163

 (031) 99010187

 inspektoratdaerah.sidoarjokab.go.id

 inspektorat@sidoarjokab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, berkat rahmat dan hidayah-Nya, dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada hakikatnya merupakan perwujudan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah merupakan implementasi penyesuaian kondisi terkini dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan, kritik dan saran tetap kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan dokumen Renja tahun berikutnya.

Sidoarjo, 6 Juni 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

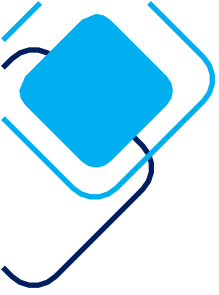
ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., M.PSDM., CGCAE

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., M.PSDM., CGCAE., CGRA

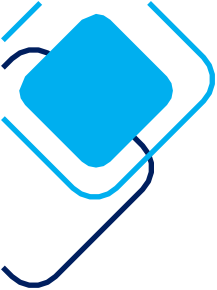
Pembina Utama Muda

NIP 197009261990031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN2025	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB IV PENUTUP.....	27



BAB I

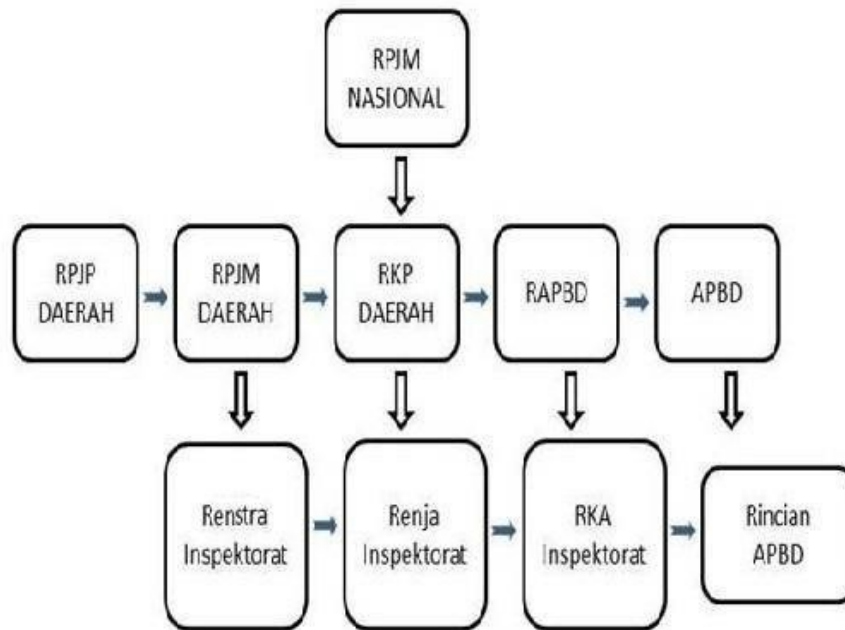
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Pada Renja OPD bisa menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam tahun berjalan, Renja dapat mengalami perubahan untuk menyesuaikan kondisi keuangan dan perubahan kegiatan dalam rangka mencapai target Renstra yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen perubahan dari Renja yang telah berjalan pada tahun berkenaan. Perubahan Renja ini berisi tujuan, sasaran, kegiatan, sasaran, lokasi kegiatan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan triwulan tahun berjalan yang menjadi acuan perumusan kegiatan, alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra. Bagian perubahan terdapat pada anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun berjalan yang disesuaikan dengan kondisi terkini pada tahun berjalan. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 000.7/1140/438.6.1/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, serta Reviu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Berikut ini disajikan hubungan keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan lainnya.

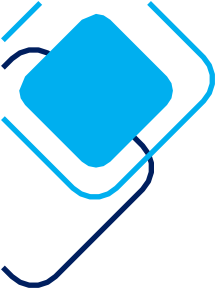


Kewajiban bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis PP Nomor 8 Tahun 2008. Dalam keempat peraturan perundang–undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Renja OPD ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.

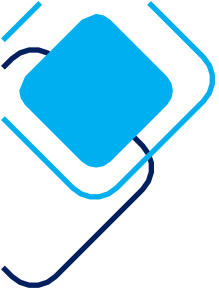
1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 adalah :

1. Undang–undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);



5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah;
17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang



- Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
 23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 24. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 000.7/1140/438.6.1/2025 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

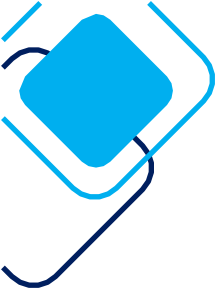
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja sebagai pedoman acuan perencanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

1. Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;
2. Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tersedianya seluruh informasi dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan diharapkan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini Inspektorat Daerah akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

1.3.2. Tujuan



Tujuan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan kondisi keuangan dan perubahan kegiatan dalam rangka mencapai target Renstra yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja OPD, keterkaitan antara Perubahan Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

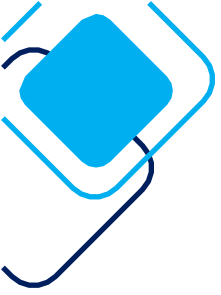
Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Bab III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

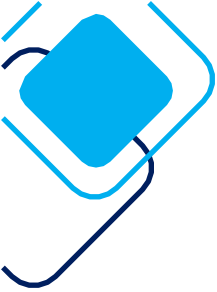
Menyajikan Rencana Kerja berupa Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah pada Tahun 2025 beserta Rencana Penganggarannya.

Bab IV. Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan,



serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target kinerja TW I	Realisasi Kinerja TW I	Capaian Kinerja TW I	Target Kinerja Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8=5/7)
1	Terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	-	<i>Integrated</i>	Proses penilaian
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	-	-	-	A	Proses penilaian
		Nilai IPP	-	-	-	A-	Proses penilaian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

Indikator kedua sasaran sampai dengan Triwulan I masih dalam proses penilaian.

2.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program

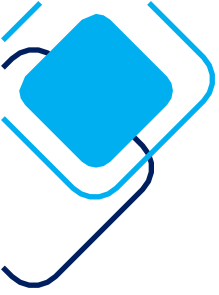
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target kinerja TW I	Realisasi Kinerja TW I	Capaian Kinerja TW I	Target Kinerja Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8=5/7)
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan	100% (49 OPD)	100% (49 OPD)	100% (49 OPD)	100% (49 OPD)	100% (49 OPD)
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi	89%	91,10%	102,36%	89%	102,36%
		Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi	94% (1076 Rekom)	90,15% (970 Rekom)	95,90%	94%	98,46% (970 Rekom)
		Persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti	100 % (12 Kasus)	100 % (12 Kasus)	100 % (12 Kasus)	100 %	100 % (12 Kasus)
		Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP minimal A	-	-	-	37%	Proses evaluasi
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	-	-	-	82%	Penilaian pada triwulan IV

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- Indikator program penyelenggaraan pengawasan sampai Triwulan I rata-rata tercapai 99,56% dengan kategori berhasil, ini diperoleh dari 4 (empat) indikator yaitu persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi, persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi, persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan, dan persentase pengaduan/kasus yang ditindaklanjuti. Sedangkan, 1 (satu) indikator yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP minimal belum tercapai karena masih dalam proses penilaian.
- Capaian indikator pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota belum tercapai karena proses penilaian akan dilakukan pada triwulan IV.

Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan masing-masing indikator sebagai berikut :



1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program :

- Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan.

Terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan :

- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan
- Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan

Terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, antara lain:

1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator sub kegiatan:

- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Capaian kinerja:

- Kinerja input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 79,79% yaitu dari target dana sebesar Rp 2.598.540,00 terealisasi sebesar Rp 2.073.500,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 3 (tiga) dokumen terealisasi sebanyak 3 (tiga) dokumen yang telah disusun.

1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Indikator sub kegiatan:

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Capaian kinerja:

- Kinerja input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 0,00% yaitu dari target dana sebesar Rp 152.500,00 terealisasi sebesar Rp 0,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) dokumen terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen yang telah disusun.

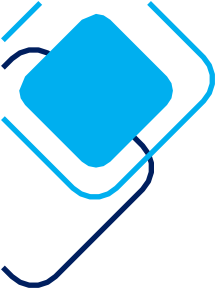
1.3. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah.

Indikator sub kegiatan:

- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah

Capaian kinerja:

- Kinerja input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar



0,00% yaitu dari target dana sebesar Rp 5.250.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00.

- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 0% yaitu dari target 0 (nol) dokumen terealisasi sebanyak 0 (nol) dokumen.

1.4. Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.

Indikator sub kegiatan:

- Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

Capaian kinerja:

- Kinerja input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 0,00% yaitu dari target dana sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 0 (nol) dokumen terealisasi sebanyak 0 (nol) dokumen yang telah disusun.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase realisasi anggaran PD

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

2.1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 86,11% yaitu dari target dana sebesar Rp 4.081.168.739,00 terealisasi sebesar Rp 3.514.136.723,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 74 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan terealisasi sebesar 74 ASN yang mendapat gaji dan tunjangan.

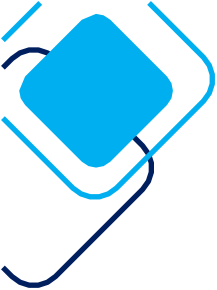
2.2. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 0,00% yaitu dari target dana sebesar Rp 4.458.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 0,00% yaitu dari target 0 (nol) dokumen terealisasi sebanyak 0 (nol) dokumen yang telah disusun.



3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator kegiatan:

- Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal
Terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, antara lain:

3.1. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 37,22% yaitu dari target dana sebesar Rp 157.116.000,00 terealisasi sebesar Rp 58.477.772,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 0,00% yaitu dari target 0 (nol) orang pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terealisasi sebesar 0 (nol) orang pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terealisasi.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan:

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Terdiri dari 9 (sembilan) subkegiatan, antara lain:

4.1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

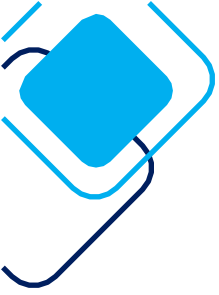
Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 88,64% yaitu dari target dana sebesar Rp 17.680.080,00 terealisasi sebesar Rp 15.672.000,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan terealisasi sebesar 1 (satu) paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

4.2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.



Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 7,03% yaitu dari target dana sebesar Rp 76.091.174,00 terealisasi sebesar Rp. 5.346.914,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan terealisasi sebesar 1 (satu) paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

4.3. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 94,07% yaitu dari target dana sebesar Rp 7.373.137,00 terealisasi sebesar Rp. 6.936.200,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) paket peralatan rumah tangga yang disediakan terealisasi sebesar 1 (satu) paket peralatan rumah tangga yang disediakan.

4.4. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 56,53% yaitu dari target dana sebesar Rp 66.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 37.309.370,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai kinerja output sebesar 0,00% yaitu dari target 0 (nol) paket bahan logistik kantor yang disediakan terealisasi sebesar 0 paket bahan logistik kantor yang disediakan.

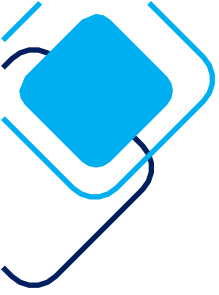
4.5. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 57,14% yaitu dari target dana sebesar Rp 4.360.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.491.500,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai



sebesar 100% yaitu dari 0 (nol) paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan terealisasi sebesar 0 (nol) paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

4.6. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 76,56% yaitu dari target dana sebesar Rp 960.000,00 terealisasi sebesar Rp 735.000,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 3 (tiga) dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan terealisasi sebesar 3 (tiga) dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

4.7. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 14,56% yaitu dari target dana sebesar Rp 184.595.959,00 terealisasi sebesar Rp 26.868.000,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) laporan fasilitasi kunjungan tamu terealisasi sebesar 1 (satu) laporan fasilitasi kunjungan tamu terealisasi.

4.8. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator subkegiatan:

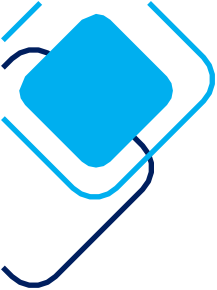
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai kinerja input sebesar 31,70% yaitu dari target dana sebesar Rp 1.190.680.000,00 terealisasi sebesar Rp. 377.397.749,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terealisasi sebesar 1 (satu) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

4.9. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Indikator subkegiatan:



- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai kinerja input sebesar 0,00% yaitu dari target dana sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD terealisasi sebesar 1 (satu) Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator kegiatan:

- Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan dengan tepat guna.

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

5.1. Subkegiatan Pengadaan Mebel.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai kinerja input sebesar 0,00% yaitu dari target dana sebesar Rp 165.356.700,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 5 (lima) paket mebel yang disediakan terealisasi sebesar 5 (lima) paket mebel yang disediakan.

5.2. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai kinerja input sebesar 70,17% yaitu dari target dana sebesar Rp 457.659.571,00 terealisasi sebesar Rp. 321.138.540,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 26 (dua puluh enam) unit peralatan dan mesin lainnya terealisasi sebesar 26 (dua puluh enam) unit peralatan dan mesin lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran.

Terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, antara lain:

6.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 28,57% yaitu dari target dana sebesar Rp 300.000,00 terealisasi sebesar Rp 85.720,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) laporan penyediaan jasa surat menyurat terealisasi sebesar 1 (satu) laporan penyediaan jasa surat menyurat.

6.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 77,07% yaitu dari target dana sebesar Rp 60.510.000,00 terealisasi sebesar Rp 46.632.908,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan terealisasi sebesar 1 (satu) laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan.

6.3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 69,27% yaitu dari target dana sebesar Rp 84.259.100,00 terealisasi sebesar Rp 58.365.852,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, terealisasi sebesar 1 (satu) laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kegiatan:

- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang

layak fungsi.

Terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, antara lain:

7.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 44,32% yaitu dari target dana sebesar Rp 6.732.378,00 terealisasi sebesar Rp 2.984.109,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya terealisasi sebesar 1 (satu) kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

7.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 68,28% yaitu dari target dana sebesar Rp 48.192.249,00 terealisasi sebesar Rp 32.903.660,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 3 (tiga) kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya terealisasi sebanyak 3 (tiga) kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya.

7.3. Subkegiatan Pemeliharaan Mebel.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Mebel yang Dipelihara.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 0,00% yaitu dari target dana sebesar Rp 3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 0 (nol) mebel yang dipelihara terealisasi

sebanyak 0 (nol) mebel yang dipelihara.

7.4. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 27,71% yaitu dari target dana sebesar Rp 46.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 12.885.000,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 11 (sebelas) peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara terealisasi sebanyak 11 (sebelas) peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

7.5. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 0,74% yaitu dari target dana sebesar Rp 157.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.165.633,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 0 (nol) unit terealisasi sebanyak 0 (nol) unit.

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator program:

- Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal yang sesuai rekomendasi
- Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan internal yang sesuai rekomendasi
- Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP minimal A
- Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti
- Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Indikator kegiatan:

- Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun tepat waktu

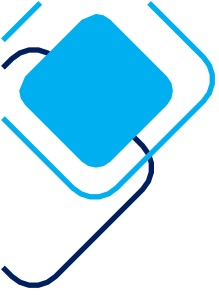
Terdiri dari 5 (lima) subkegiatan, antara lain:

1.1. Subkegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Capaian kinerja:



- Kinerja input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 7,94% yaitu dari target dana sebesar Rp 411.784.740,00 terealisasi sebesar Rp 32.700.000,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 79 (tujuh puluh sembilan) laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah terealisasi sebesar 79 (tujuh puluh sembilan) laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah.

1.2. Subkegiatan Reviu Laporan Kinerja.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 47,92% yaitu dari target dana sebesar Rp 10.434.400,00 terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 2 (dua) laporan hasil reviu laporan kinerja yang terealisasi sebesar 2 (dua) laporan hasil reviu laporan kinerja.

1.3. Subkegiatan Reviu Laporan Keuangan.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil reviu keuangan.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 61,33% yaitu dari target dana sebesar Rp 9.864.160,00 terealisasi sebesar Rp. 6.050.000,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 0 (nol) laporan hasil reviu laporan keuangan yang disusun terealisasi sebesar 0 (nol) laporan hasil reviu laporan keuangan.

1.4. Subkegiatan Pengawasan Desa.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan desa.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 52,59% yaitu dari target dana sebesar Rp 179.845.000,00 terealisasi sebesar Rp 94.582.500,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 12 (dua belas) laporan hasil pengawasan desa yang terealisasi sebesar 12 (dua belas) laporan hasil pengawasan desa.

1.5. Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Capaian kinerja:

- Kinerja input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 22,36% yaitu dari target dana sebesar Rp 12.076.920,00 terealisasi sebesar Rp 2.700.000,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 100% yaitu dari target 1 (satu) laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terealisasi sebesar 1 (satu) laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator kegiatan:

- Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disusun tepat waktu.

Terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, antara lain:

2.1. Subkegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Indikator subkegiatan:

- Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani.

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 0,00% yaitu dari target dana sebesar Rp 78.897.000,00 terealisasi sebesar Rp 0,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai sebesar 0% yaitu dari target 0 (nol) laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani terealisasi sebesar 0 (nol) laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani.

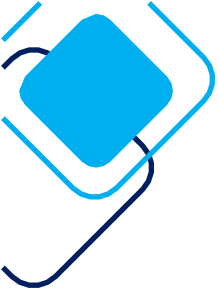
2.2. Subkegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Indikator subkegiatan:

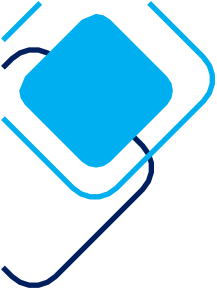
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Capaian kinerja:

- Kinerja Input, sampai dengan Triwulan I, kinerja input telah tercapai sebesar 95,92% yaitu dari target dana sebesar Rp 677.446.000,00 terealisasi sebesar Rp 649.829.000,00.
- Kinerja output, sampai dengan Triwulan I, kinerja output telah tercapai



sebesar 100% yaitu dari target 3 (tiga) laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu terealisasi sebesar 3 (tiga) laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu.



2.1.3. Permasalahan / Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja (Bappeda dan Bag. Organisasi) sehingga target kinerja pemantauan dan sosialisasi tidak dapat tercapai 100%.
2. Tindak Lanjut terhambat pada mitra kerja sama, yaitu ATT Pasar (Kepuhkiriman, Krian, Tulangan).
3. Nilai SKM belum tercapai pada Irban 2 dan 4
4. Masih banyak pegawai terlambat masuk kerja

2.1.4. Rekomendasi atas Permasalahan

Rekomendasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka perbaikan pencapaian target pada Triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut:

Untuk Irban 2

1. Lakukan koordinasi secara intens dengan Bappeda terkait membangun budaya sadar risiko dan lakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi mengenai pembangunan Zona Integritas.
2. Lakukan penyebaran barcode SKM setelah pelaksanaan pengawasan
3. Tingkatkan layanan audit berbasis digital, salah satunya yaitu pemenuhan dokumen pada saat audit pendahuluan dapat disampaikan secara online
4. Berikan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas evaluasi SAKIP kepada PD yang bersangkutan agar dapat dilakukan perbaikan lebih lanjut oleh PD tersebut

Untuk Irban 4

1. Lakukan upaya peningkatam capaian kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
2. Lakukan penyebaran barcode SKM setelah pelaksanaan pengawasan

Untuk Irban 3

1. Lakukan pencatatan atas kegiatan konsultasi yang dilaksanakan melalui berbagai media komunikasi.
2. Tingkatkan layanan audit berbasis digital, salah satunya yaitu pemenuhan dokumen pada saat audit pendahuluan dapat disampaikan secara online

Untuk Sekretariat

Buatkan analisis mengenai penyebab atas pegawai yg terlambat, salah satunya caranya adalah wawancara.

2.1.5. Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

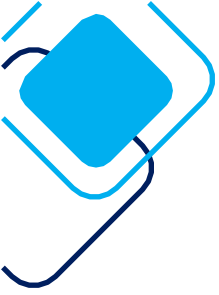
No	Uraian Perbaikan	Penanggungjawab
1	Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi terkait budaya sadar risiko dan zona integritas	Irbn 2
2	Secara rutin melaksanakan penyebaran barcode SKM setelah kegiatan pengawasan	Irbn 2 dan 4
3	Menyusun rencana pemenuhan dokumen audit secara online	Irbn 2, 3
4	Menyusun rencana aksi pendistribusian LKE atas SAKIP OPD	Irbn 2
5	Menyusun rencana aksi peningkatan kinerja Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) OPD	Irbn 4
6	Menertibkan administrasi konsultasi pada semua media	Irbn1,2,3, dan 4
7	Membuat analisa mengenai penyebab pegawai yg terlambat	Sekretariat

2.1.6. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan hasil analisis terhadap visi misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementrian, sertadengan memperhatikan tuntutan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorongtercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuatdalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Sidoarjo, maka perlu dilakukan pemetaan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis yaitu melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pelayanan PD. Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan terutama pengawasan proyek pekerjaan umum;
2. Masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat pada tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan;
3. Obrik kurang respon atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi kewajibannya meskipun sudah diberikan peringatan (khususnya temuan/rekomendasi yang lama);



4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal pada tingkat OPD;
5. Kapabilitas SDM APIP masih perlu ditingkatkan; serta
6. Keterbatasan fungsional auditor yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi.

Berdasarkan permasalahan yang ada diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Jika kemampuan aparat pengawas ditingkatkan maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan lebih optimal dan profesional;
2. Perlu adanya analisis yang lebih mendalam terhadap obyek pemeriksaan yang berpeluang/beresiko tinggi terjadi penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan;
3. Jika Inspektorat Daerah sebagai OPD pembina SPIP melaksanakan fungsinya secara intensif sebagaimana yang telah ditentukan, maka implementasi SPIP di tingkat OPD akan berjalan optimal.

2.1.7. Kelemahan Dan Kekuatan Internal

Adapun Kelemahan dan Kekuatan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

a. Kelemahan

1. Kemampuan Aparat Pengawasan yang tidak merata;
2. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan yang ada saat ini belum memadai.

b. Kekuatan

1. Adanya dukungan pimpinan daerah;
2. Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas;
3. Adanya kewenangan yang jelas;
4. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.1.8. Peluang dan Tantangan External

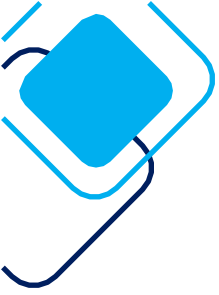
Adapun Peluang dan Tantangan External Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

a. Peluang

1. Adanya kesempatan meningkatkan kinerja pengawasan sesuai dengan perubahan kelembagaan;
2. Adanya kesempatan meningkatkan SDM aparat pemeriksaan melalui pendidikan fungsional pengawasan.

b. Tantangan

1. Apabila terjadi mutasi pegawai yang telah mendapatkan sertifikat pengawasan sedang penggantinya belum siap dengan tugas baru;



2. Regulasi berubah-ubah;
3. Adanya isu KKN, selaku APIP yang menjadi obrik adalah kolega sendiri.

Faktor-faktor sebagai penentu keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia (personil) yang profesional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
3. Hasil pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi instansi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kinerja instansi.
4. Pemantauan/monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, sehinggahasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan yang direncanakan terutama pada obyek pemeriksaan yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan.
5. Hasil evaluasi program pengawasan selalu digunakan sebagai bahan perbandingan perencanaan program pengawasan tahun berikutnya
6. Hasil tindak lanjut pengawasan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

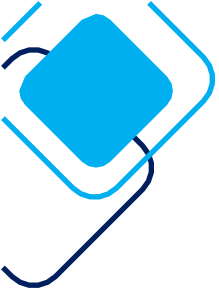
BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang tertuang pada pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022, pada tahun 2025 akan mengoptimalkan sistem pengawasan internal untuk mendukung terwujudnya 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang tertuang pada RPJMD tahun 2021-2026. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, berikut ini adalah rencana kerja dan pendanaan Inspektorat tahun anggaran 2025:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.324.718.408,00	23.770.730.750,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.348.540,00	73.619.140,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.098.540,00	3.369.140,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.250.000,00	16.250.000,00
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	33.500.000,00	33.500.000,00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.500.000,00	20.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.950.707.984,00	16.760.569.536,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.932.407.984,00	16.733.269.536,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.300.000,00	27.300.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	810.618.000,00	705.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	810.618.000,00	705.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.998.618.838,00	1.980.049.509,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	17.680.080,00	20.124.855,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.091.174,00	86.705.164,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.373.136,00	62.195.043,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	256.200.000,00	256.200.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.460.000,00	33.160.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00	3.840.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.042.150,00	165.392.150,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.393.932.297,00	1.347.432.297,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	5.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.198.845.019,00	1.485.240.406,00
	Pengadaan Mebel	338.917.188,00	548.725.725,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	859.927.831,00	936.514.681,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.166.968.400,00	1.093.086.532,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.896.000,00	253.815.732,00

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	921.072.400,00	838.270.800,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.105.674.627,00	1.673.165.627,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.732.378,00	19.732.378,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.192.249,00	135.192.249,00
		Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	60.000.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.500.000,00	186.500.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.755.250.000,00	1.271.741.000,00
2)		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.945.581.460,00	3.300.601.670,00
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.595.479.460,00	1.794.350.670,00
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	823.522.240,00	984.211.240,00
		Reviu Laporan Kinerja	13.734.400,00	13.734.400,00
		Reviu Laporan Keuangan	12.114.160,00	12.114.160,00
		Pengawasan Desa	687.197.740,00	712.379.950,00
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	58.910.920,00	71.910.920,00
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.350.102.000,00	2.756.251.000,00
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	654.656.000,00	692.906.000,00
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	695.446.000,00	2.063.345.000,00
		JUMLAH	27.270.362.868,00	28.321.332.420,00



BAB IV

PENUTUP

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada RKPD serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Dalam tahun berjalan, kondisi dapat berubah yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan. Agar tujuan tetap tercapai dibutuhkan perubahan perencanaan yang tertuang dalam perubahan renja.

Penetapan perubahan terhadap program, kegiatan, serta sub kegiatan yang tertuang didalam Rancangan Akhir Perubahan Renja merupakan penyesuaian atas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk mencapai penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.